

# Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)

E-ISSN: 2986-9528 | P-ISSN: 2986-9439  
Website <https://ejournal.lapad.id/index.php/pjpi>

Open Access under CC BY NC SA  
Copyright © 2025, Anisa Nurana, et.al

Vol. 3, No. 3, 2025, 399-408  
DOI: <https://doi.org/10.61930/pjpi.v3i3>

## Peran Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Demokrasi Mahasiswa

Anisa Nurana<sup>1</sup>, Rizky Amalia Syaputri<sup>2</sup>, Azzel Aulia Putri<sup>3</sup>, Keila Bunga Mentari<sup>4</sup>,  
Adek Intan<sup>5</sup>, Riska Riani<sup>6</sup>, Choiriyah<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS)

Indo Global Mandiri Palembang

Email: Anisanurana39@gmail.com

### Abstract:

*Islamic Religious Education (PAI) plays a vital role in shaping students' awareness of legal values, human rights, and democratic practices. This study aims to analyze the contribution of PAI in the internalization of Islamic values through a qualitative approach using library research, in-depth interviews, classroom observation, and document analysis. The findings indicate that understanding "Maqāsid al-Syarī'ah" and the value of justice (adl) enhances students' legal awareness. The values of "karāmah al-insān" and "ukhuwah insāniyyah" promote a more contextual understanding of human rights, while the value of "syūrā" supports ethical and participatory democratic engagement. The success of this internalization process is highly influenced by the pedagogical methods employed and the institutional support provided by universities. This study confirms the strategic importance of PAI as a foundation for public ethics in promoting humanistic, democratic, and contextual civic awareness among students.*

**Keywords:** Democracy; Human Rights; Islamic Religious Education; Legal Awareness; Students.

### Abstrak:

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), dan praktik demokrasi di kalangan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi PAI dalam proses internalisasi nilai-nilai keislaman melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, wawancara mendalam, observasi pembelajaran, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap "Maqāsid al-Syarī'ah" dan nilai keadilan "adl" mampu memperkuat kesadaran hukum mahasiswa. Nilai "karāmah al-insān" dan "ukhuwah insāniyyah" mendorong kesadaran HAM yang lebih kontekstual, sementara nilai "syūrā" memperkuat praktik demokrasi yang etis dan partisipatif. Keberhasilan internalisasi nilai-nilai tersebut sangat bergantung pada pendekatan pedagogis yang digunakan dan dukungan institusional dari perguruan tinggi. Studi ini menegaskan pentingnya PAI sebagai fondasi etika publik dalam membangun kesadaran kewarganegaraan mahasiswa secara humanis, demokratis, dan kontekstual.

**Kata Kunci:** Demokrasi; Hak Asasi Manusia; Kesadaran Hukum; Mahasiswa; Pendidikan Agama Islam.

## PENDAHULUAN

Di tengah perkembangan dinamika sosial dan politik di Indonesia, mahasiswa harus memiliki kesadaran hukum yang kontekstual dan aplikatif, bukan hanya formal atau tekstual. Mahasiswa, sebagai kelompok intelektual muda yang berfungsi sebagai agen perubahan, memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas demokrasi karena mereka memahami hukum dengan baik. Meskipun demikian, pemahaman mahasiswa tentang hukum seringkali terbatas pada sudut pandang positivistik-legalistik, yang menganggap bahwa pelanggaran hanya dapat dimotivasi oleh ancaman sanksi resmi. Pendidikan Agama Islam (PAI) sangat penting dalam situasi ini bukan hanya sebagai pelajaran teologis, tetapi juga sebagai landasan moral publik yang mengajarkan mahasiswa untuk memahami hukum sebagai cara untuk mencapai keadilan sosial yang penting (H. M. Ikhsanudin, S.Ag. MSI., 2023).

Salah satu masalah utama di lingkungan perguruan tinggi adalah adanya perbedaan antara pemahaman kita tentang demokrasi secara teoretis dan bagaimana ia diterapkan dalam dunia nyata. Banyak siswa menganggap demokrasi hanya sebagai proses pemungutan suara, tanpa mengingat pentingnya musyawarah "*syūrā*" dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Dalam situasi seperti ini, Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki tugas strategis untuk menghubungkan nilai-nilai agama dengan tanggung jawab sipil, memastikan bahwa praktik demokrasi di kampus didasarkan pada kerangka moral yang kuat. Kegagalan institusi pendidikan untuk mengubah ajaran agama menjadi nilai-nilai bernegara yang dapat diterapkan seringkali menyebabkan apatis politik di kalangan siswa intelektual (Suhartono., 2024).

Di perguruan tinggi umum, Pendidikan Agama Islam (PAI) sering bersifat ritualistik dan eskatologis, kurang menekankan dimensi kewarganegaraan (civic virtue). Ini terlepas dari fakta bahwa PAI memainkan peran penting dalam pembentukan karakter mahasiswa. Mahasiswa kesulitan menggabungkan identitas keislaman mereka dengan tanggung jawab sebagai warga negara dalam masyarakat multikultural karena kurikulum yang tidak menanggapi masalah hak asasi manusia (HAM) dan praktik demokrasi. Namun, agama Islam sangat menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan perlindungan hak-hak sipil. Pendidikan agama berisiko hanya menjadi formalitas administratif jika tidak ada sinkronisasi antara prinsip agama dan realitas sosial. Akibatnya, kontribusinya terhadap pembentukan karakter kewarganegaraan yang kritis dan partisipatif akan

menjadi terbatas (Agus Yosep Abduloh, 2022).

Dalam penelitian ini, "*Maqāṣid al-Syarī'ah*", atau tujuan syariat, diposisikan sebagai kerangka epistemologis yang digunakan untuk merekonstruksi pemahaman hukum mahasiswa. Pendekatan ini, berbeda dengan perspektif konservatif, menekankan bahwa penjagaan agama (*hifdz al-din*) harus disertai dengan penjagaan akal (*hifdz al-aql*) dan martabat manusia (Khasanah, et.al, 2023). Oleh karena itu, demokrasi dan hak asasi manusia dilihat dalam Islam sebagai manifestasi dari tujuan syariat yang universal, bukan sebagai nilai asing yang bertentangan dengan iman. Dengan metode ini, siswa dapat berpikir kritis sekaligus tetap percaya pada kebijakan publik. sesuaikan pernyataan ini dengan pernyataan sebelumnya (Irmayanti, Azizah Putri, 2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana internalisasi nilai keadilan "*adl*" dan musyawarah "*syūrā*" dapat berdampak pada praktik demokrasi yang diterapkan oleh mahasiswa di **Universitas Indo Global Mandiri**. Model pembelajaran dialogis menghubungkan teks Islam klasik dengan masalah hukum modern, yang menjadi pusat penelitian baru. Fokus utama penelitian adalah bagaimana nilai "*Maqāṣid al-Syarī'ah*" dan "*syūrā*" dapat diterapkan untuk meningkatkan integritas sipil mahasiswa secara konsisten sambil memberikan kontribusi praktis untuk pengembangan kurikulum PAI yang inklusif dan responsif.

## LANDASAN TEORI

### Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi

Di perguruan tinggi, Pendidikan Agama Islam (PAI) berfungsi untuk membangun kepribadian mahasiswa dengan cara yang memungkinkan mereka menunjukkan kesadaran sosial dan kewarganegaraan mereka selain keyakinan religius mereka sendiri. Sehingga ajaran Islam dapat diposisikan sebagai landasan etika publik, PAI bertujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai keislaman dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara. PAI membantu mahasiswa membangun karakter, meningkatkan sikap kritis, dan meningkatkan tanggung jawab sosial mereka sebagai warga negara yang baik (Diana Sari, Jumra Hayani, 2023).

### **Pendidikan Agama Islam dan Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum adalah kumpulan elemen yang mencakup pemahaman, pendapat, atau tindakan seseorang terhadap hukum yang ditetapkan dan diterapkan dalam masyarakat. Menurut pandangan Islam, hukum digunakan sebagaimana mencapai kemaslahatan umum daripada sekadar pengaturan yang represif. Konsep "*Maqāṣid al-Sharī'ah*" menyatakan bahwa perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan adalah prioritas utama hukum Islam (Hamzani, et.al, 2024). Dalam Pendidikan Agama Islam (PAI), siswa dididik untuk memaknai hukum sebagai nilai moral yang didasarkan pada keadilan "*adl*" dan kemanusiaan. Dengan demikian, pemahaman mereka tentang hukum berkembang lebih dari sekedar pemahaman formal, tetapi berkembang secara substansial (Fauzan & Putra, 2024).

### **Pendidikan Agama Islam dan Hak Asasi Manusia**

Prinsip "*karāmah al-insān*", yang mengakui martabat manusia sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, adalah inti dari konsep hak asasi manusia dalam Islam. Menurut prinsip ini, setiap orang memiliki hak dasar yang harus dihormati tanpa diskriminasi. Melalui penekanan pada nilai keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial, Pendidikan Agama Islam (PAI) berfungsi sebagai wahana integratif yang menghubungkan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembelajaran PAI dapat membantu mahasiswa memahami dan memahami bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian penting dari ajaran Islam serta merupakan landasan penting untuk mewujudkan kehidupan sosial yang berkeadilan (Munadiyatul Khoiroh, 2025).

### **Pendidikan Agama Islam dan Demokrasi**

Dalam perspektif Islam, prinsip musyawarah, atau "*syūrā*", dapat digunakan untuk memahami demokrasi. Prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi kolektif, diskusi, dan pengambilan keputusan. Pendidikan Agama Islam (PAI) membantu mahasiswa memahami demokrasi sebagai sistem nilai yang mendukung keadilan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama, bukan hanya sebagai sistem politik. PAI mengajarkan mahasiswa untuk bertoleransi, menghargai berbagai perspektif, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis di lingkungan akademik dan sosial melalui penerapan pendekatan

pembelajaran yang dialogis dan partisipati (Ratnaningsih & Nahartini, 2020).

### **Kerangka Konseptual Penelitian**

Menurut presentasi tersebut, Pendidikan Agama Islam (PAI) dianggap sebagai faktor penting yang berkontribusi besar dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman mahasiswa tentang demokrasi. Diharapkan bahwa dengan mengintegrasikan nilai-nilai "*Maqāṣid al-Syari'ah*", keadilan "*adl*", penghormatan terhadap martabat manusia "*karāmah al-insān*", serta prinsip musyawarah "*syūrā*" dalam proses pembelajaran PAI, akan menjadi mungkin untuk membentuk kesadaran kewarganegaraan mahasiswa secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selanjutnya, kerangka konseptual ini digunakan sebagai dasar analisis untuk menyelidiki peran PAI dalam meningkatkan kesadaran hukum dan demokrasi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi (Irmayanti, Azizah Putri, 2024).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini kualitatif dan berfokus pada proses internalisasi nilai-nilai keislaman dalam pembentukan kesadaran kewarganegaraan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Studi ini dilakukan di Universitas Indo Global Mandiri di Palembang selama semester ganjil tahun akademik 2025/2026. Informasi dipilih secara acak dan terdiri dari enam mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan seperti BEM atau HIMPS dan terlibat secara langsung dalam kegiatan demokrasi dan aktivitas sipil di kampus.

Data utama dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang difokuskan pada tiga aspek: nilai "*Maqāṣid al-Syari'ah*" dan keadilan "*adl*", kesadaran HAM berdasarkan prinsip "*karāmah al-insān*", serta praktik demokrasi berbasis musyawarah "*syūrā*". Pertanyaan difokuskan pada pemahaman mahasiswa terhadap hukum negara dari perspektif tujuan syariat dan pengaruh nilai "*syūrā*" dalam pengambilan keputusan organisasi. Selain wawancara, data juga diperkuat melalui observasi proses pembelajaran di kelas dan kajian dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Analisis dilakukan dengan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi metode dan sumber, serta konsistensi transliterasi Arab-Latin (Qomaruddin, 2024).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Internalisasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pembentukan Kesadaran Hukum:**

Penelitian menunjukkan bahwa kerangka "*Maqāṣid al-Syarī'ah*" menempatkan hukum sebagai cara untuk melindungi kemaslahatan dan martabat manusia. Metode ini mungkin dapat mengubah persepsi siswa tentang kepatuhan formal menjadi kesadaran moral yang didasarkan pada tanggung jawab etis daripada hanya takut akan sanksi. Dalam konteks pendidikan, penerapan nilai "*adl*" (keadilan) telah terbukti meningkatkan kesadaran siswa terhadap praktik ketidakadilan di kampus. Semua ini dilakukan sambil mempertahankan peraturan hukum nasional. Pendidikan Agama Islam (PAI) juga menjadi pedoman moral yang membantu siswa dalam membuat keputusan yang baik untuk kepentingan umum berkat penggunaan pendekatan pembelajaran berbasis studi kasus (Abdullah, 2017).

### **Prinsip karāmah al-insān sebagai Landasan Penghormatan HAM:**

Martabat Manusia adalah fondasi moral penting untuk menumbuhkan kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang inklusif di kalangan mahasiswa. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang menekankan prinsip-prinsip ini terbukti efektif dalam mencegah sikap eksklusif dan radikalisme. PAI juga membantu siswa memahami hak-hak sipil dalam konteks dinamika sosial yang kompleks. Dengan melihat Islam sebagai "*rahmatan lil 'ālamīn*", siswa memperoleh pijakan normatif yang kuat untuk melindungi kebebasan beragama dan hak individu dalam lingkungan akademik yang plural. Selain itu, prinsip "*ukhuwah insāniyyah*" mendorong sikap pluralisme dengan menempatkan persaudaraan antar-manusia sebagai dasar penguatan kohesi sosial di kampus (Ali, 2022).

### **Implementasi Nilai Syūrā dalam Praktik Demokrasi:**

Penerapan prinsip musyawarah "*syūrā*" dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) membekali mahasiswa dengan kemampuan mengambil keputusan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Perbedaan pendapat dalam organisasi kemahasiswaan dipandang sebagai sarana diskusi konstruktif yang memperkuat budaya demokrasi di perguruan tinggi. Keberhasilan internalisasi nilai ini ditopang oleh pendekatan pedagogis dialogis dan partisipatif, di mana dosen berperan sebagai fasilitator yang mengaitkan teks klasik dengan konteks modern. Dengan demikian, PAI berfungsi sebagai fondasi etika publik untuk menghasilkan lulusan yang religius, kritis, dan

berkomitmen pada keadilan sosial (Aprilya & Tohawi, 2024).

Meskipun internalisasi nilai *syūrā* dan *Maqāṣid al-Syari'ah* telah terbukti berhasil meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa di Universitas Indo Global Mandiri, tantangan besar muncul dari dominasi positivisme hukum di lingkungan akademik umum. Sejalan dengan hal tersebut, implementasi di tingkat kelas sangat bergantung pada kesiapan serta pendekatan pedagogis para pendidik, Sejalan dengan perlunya reformasi kurikulum tersebut, Implementasi kurikulum di tingkat kelas sangat bergantung pada kesiapan pendidik dan pendekatan pedagogis mereka (Agus Yosep Abduloh, 2022.; Yen Happy Rahmi., 2026)

### **Internalisasi nilai-nilai adl, syūrā, dan maṣlahah sangat bergantung pada pendekatan pedagogis pendidik:**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) di *Universitas Indo Global Mandiri* membantu dengan menggunakan model pembelajaran dialogis untuk mengaitkan teks Islam klasik dengan konteks sosial modern. Terbukti bahwa menyinkronkan literasi kewarganegaraan modern dengan prinsip-prinsip Islam sangat penting untuk menghasilkan siswa yang berkomitmen pada keadilan sosial. Keyakinan religius siswa juga dapat berkembang menjadi etika sosial yang aplikatif dengan dukungan institusional, seperti kurikulum yang inklusif dan responsif (Yen Happy Rahmi., 2026).

### **Mahasiswa sebagai Mediator dan Penjaga Kebebasan Beragama:**

Nilai "*ukhuwah insāniyyah*" menempatkan mahasiswa sebagai mediator yang adil dalam menghadapi konflik identitas yang mungkin terjadi di lingkungan kampus. Mahasiswa tidak hanya menonton, mereka juga aktif dalam menjaga kebebasan agama mereka dengan berpartisipasi dalam diskusi lintas agama dan kegiatan moderasi agama. Hasilnya menunjukkan bahwa PAI dapat membantu siswa mempertahankan hak-hak sipil di tengah dominasi paham eksklusif. Dengan demikian, siswa dapat menyelaraskan keyakinan keislaman mereka dengan kewajiban sebagai warga negara yang menghargai pluralisme (Putry Ana Suryaningsih., 2025).

## SIMPULAN

Pendidikan agama Islam memiliki tugas strategis untuk mengubah perhatian siswa dari kepatuhan hukum formal ke komitmen moral substansial. Ada bukti bahwa nilai-nilai “*Maqāṣid al-Syari’ah*”, “*adl*”, “*karāmah al-insān*” dan “*syūrā*” mendorong sikap yang inklusif dan partisipasi yang etis dalam sistem demokratis. Penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran dialogis menjadikan PAI sebagai fondasi etika publik yang berguna untuk membentuk civitas akademika yang sehat. Penelitian selanjutnya harus memperluas lokus penelitian ke berbagai konteks sosiokultural, dan pendidik harus terus menggunakan metode berbasis studi kasus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2017). Islamic Studies In Higher Education In Indonesia. *Of Islamic Studies*, 55(2), 391-426. <https://doi.org/10.14421/ajis.2017.552.391-426>
- Agus Yosep Abduloh, D. (2022). The Urgency of Multicultural Islamic Education, Democracy And Human Rights In Indonesia. *Interdisciplinary Islamic Studies (IJIS)*, 5(2). <https://doi.org/10.20885/ijis.vol.5.iss2.art2>
- Ali, M. Bin. (2022). Delineating the Concept of Human Dignity in the Quran : Karamah Al-insan as an Antidote to Religious Conflicts and Violence. *Advances in Social Sciences Research*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.14738/assrj.91.11541>
- Aprilya, P. K., & Tohawi, A. (2024). Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Islamic Law: Jurnal Siyasaḥ*, 9(1), 1-13. <https://doi.org/https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593> Implementasi
- Diana Sari, Jumra Hayani, N. (2023). Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Diana. *Pendidikan Dan Konseling*, 5(4), 199-207. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i4.17282>
- Fauzan, D. R., & Putra, R. A. (2024). *Peran Pendidikan Islam dalam Membentuk Kesadaran Hukum Syariah di Masyarakat Muslim*. 1, 8-10.
- Hamzani, A. I., Soeharto, A., & Aravik, H. (2024). The Relevance of Mashlahat Theory for the Development of Contemporary Islamic Law: Study of Prevention COVID-19 in Indonesia. *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, 10(2), 197-206.
- H. M. Ikhsanudin, S.Ag. MSI., D. (2023). *Dinamika Pemikiran Islam* (Maghfur M Ramin (ed.)).
- Irmayanti, Azizah Putri, D. (2024). Urgensi Hukum Islam Dan Maqashid Syari’ Ah Dala M Pendidikan Agama Islam. *Pendidikan Islam*, 13(1), 59-68. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v13i1.13289>
- Khasanah, N., Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2023). Religious moderation in the Islamic education system in Indonesia. *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 15(1), 629-642.

- Munadiyatul Khoiroh, T. N. R. (2025). Internalisasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Pendidikan Dini: Strategi Pembentukan Ham Pada Generasi Muda. *Inovasi Pendidikan Anak Usia Din*, 5(1), 10–17. <https://doi.org/10.51878/edukids.v5i1.5421>
- Putry Ana Suryaningsih., D. (2025). Peran Mahasiswa dalam Menyikapi Perbedaan Pemahaman dalam Beragama di Tengah Masyarakat. *Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(4), 602–610. <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/k7kcf>
- Qomaruddin, H. S. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Ratnaningsih, S., & Nahartini, D. (2020). *The Role of Islamic Education on Increasing Democratic Attitude and Religious Tolerance in High School Students in Indonesia*. 408(Iconist 2019), 125–128. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200220.022>
- Suhartono., D. (2024). Demokrasi Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Multi Sciences*, 16(1), 43–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.30599/jti.v16i1.3250>
- Yen Happy Rahmi., D. (2026). Internalisasi Nilai Politik Dan Hukum Qur’ani Dalam Pendidikan Islam: Perspektif Syura, Amanah, Rule Of Law, Dan Maqasid Syariah. *Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 61–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.2983>

